

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI  
FISKAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN  
SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**NOOR ANDI FAKHRUDDIN YUSUF**

**NIM. C2B 008 088**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Noor Andi Fakhruddin Yusuf  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008088  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI  
FISKAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN  
SURAKARTA**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto., MSc., PhD

Semarang, 14 April 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Edy Yusuf Gunanto., MSc., PhD.)  
NIP. 195811221984031002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Noor Andi Fakhruddin Yusuf  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008088  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI  
FISKAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI  
KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN  
SURAKARTA**

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal 9 Mei 2014

Tim Penguji :

1. Drs. H. Edy Yusuf Agung Gunanto., MSc., PhD (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono., MSc (.....)
3. Nenek Woyanti., SE. Msi (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri. SE., Mcom., PhD., Akt  
NIP. 196708091992031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noor Andi Fakhruddin Yusuf, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN SURAKARTA adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 April 2014

Yang membuat pernyataan,

(Noor Andi Fakhruddin Yusuf)

NIM. C2B008088

## **ABSTRACT**

*The aim of fiscal decentralization is regional development. Former local government revenue in the district / city residency ex Surakarta comes from local revenue (PAD), the general allocation fund (DAU), a special allocation fund (DAK), revenue-sharing (DBH), While local government expenditures are capital expenditures (BM). The human development index is used as a benchmark for the successful implementation of fiscal decentralization to see the level of welfare in the region.*

*This study aims to : (1) analyze the effect of local revenue (PAD) of the Capital Expenditure (BM) in the district/city residency ex Surakarta. (2) Analyze the effects of the general allocation fund (DAU) to the Capital Expenditure (BM). (3) Analyze the effects of the special allocation fund (DAK) on Capital Expenditure (BM). (4) Analyze the effects of revenue-sharing (DBH) of the Capital Expenditure (BM). (5) Analyze the effects of Capital Expenditure (BM) of the human development index (HDI). The method used in this study is the method of linear regression panel data from 2004 to 2011 by using Fixed Effect Model.*

*These results indicate that of the five variables that have tested the general allocation fund (DAU) and revenue sharing (DBH) has a significant impact on capital expenditures (BM), while local revenue (PAD) and the special allocation fund (DAK) is not significant effect on capital expenditures (BM), in addition to the capital expenditure (BM) has a significant effect on the human development index in the district / city residency ex Surakarta.*

*Keywords: Fiscal decentralization, Fixed Effect Model, local revenues, general allocation fund, the special allocation fund, revenue-sharing, capital expenditure, human development index.*

## ABSTRAK

Salah satu pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Melalui penerimaan berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan pengeluaran berupa belanja modal (BM) di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta, dalam menghasilkan pembangunan manusia melalui nilai indeks pembangunan manusia. Yaitu untuk melihat seberapa jauh tingkat kesejahteraan manusia.

Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM) di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta. (2) Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM). (3) Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM). (4) Menganalisis pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM). (5) Menganalisis pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Indeks pembangunan manusia (IPM). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi linear panel data dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan waktu penelitian tahun 2004 – 2011.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima variabel yang telah diuji dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal (BM), sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (BM), selain itu belanja modal (BM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, Fixed Effect Model, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal, indeks pembangunan manusia.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN SURAKARTA”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Ekonomi studi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, Msi., Akt., PhD selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc., PhD selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Dra. Tri Wahyu Rejekiingsih, Msi selaku dosen wali yang memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro baik dari IESP, Manajemen, dan Akuntansi yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu selama penulis menempuh studi.
5. Ir. Noor Akhyar Yusuf, Aniek Rahayu, Ricky Zeonitra Zulkarnaen Yusuf ST, Fajar Restuningrum, Ilyas Nurdiansyah Yusuf, Aldila Ayu Noor Sya'bani

selaku keluarga penulis yang telah memberikan banyak sekali dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, dan doa dalam penyelesaian skripsi.

6. Niken Agustin, SE yang tak pernah lelah memberikan semangat dan bantuannya, serta salah satu alasan tulisan ini ada.
7. Kawan – kawan seperjuangan di Gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, pemahaman, dan persahabatan. Paman Bete, mas Roy, mas Gentong, Theo, Wulan, Ucil, Ayip, Putra, Tito, Ketut, Firza, Finta, Jackson, Iis, Muji, Anggar, Silvi, Nicki, Akita, Ucup, Radit, Annas, Dika, Mudas, Aik, Danu, Dogol, Hendi, Jaya, Putri, Hafiz, David, Preketek, Januar, Yudha, Hendrik, Pepin, Adam, Oweh, Pecel, Kunto, Monic, Robi, Beta, dll yang belum disebutkan.
8. Kepengurusan HMJ IESP Reg 2 FEB UNDIP periode 2008/2009, kepengurusan MPM FEB UNDIP periode 2009/2010, Kepengurusan BEM FEB UNDIP periode 2010/2011, saya ucapkan terima kasih atas semua pengalaman yang diberikan selama penulis aktif berorganisasi, **JAYA EKONOMI!!!**
9. Kawan – kawan IESP reg 2 2008, atas segala semangat dan persahabatanya, **JAYA IESP!!!**
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan karena pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang terbatas. Penulis mohon maaf jika dalam penyusunan skripsi ini masih kurang berkenan

dalam pandangan pembaca, semoga ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 13 April 2014

Noor Andi Fakhruddin Yusuf

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	23
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	25
1.4 Sistematika Penulisan .....	26
BAB II. TELAAH PUSTAKA .....	28
2.1 Landasan Teori .....	28
2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi .....	28
2.1.2 Desentralisasi Fiskal .....	32
2.1.3 Peranan Pemerintah .....	35
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	37
2.1.5 Penerimaan Pemerintah .....	42
2.1.6 Anggaran Pemerintah .....	43
2.1.7 Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah .....	45
2.1.8 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah .....	47
2.1.9 Kesejahteraan Masyarakat .....	50
2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia .....	51
2.2 Penelitian Terdahulu .....	55
2.3 Kerangka Pemikiran .....	64
2.4 Hipotesis .....	65
BAB III. METODE PENELITIAN .....	67
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	67
3.1.1 Variabel Penelitian .....	67
3.1.2 Definisi Operasional .....	67
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	68
3.3 Metode Penelitian .....	68
3.3.1 <i>Pooled Least Square</i> .....	69
3.3.2 <i>Fixed Effect Model</i> .....	70
3.3.3 <i>Random Effect Model</i> .....	71
3.3.4 Pemilihan Model .....	72
3.3.4.1 Uji LM_Test .....	72
3.3.4.2 Uji Hausman .....	73
3.3.5 Model Analisis .....	73

3.3.6 Deteksi Asumsi Klasik .....	75
3.3.6.1 Deteksi Multikolinearitas .....	76
3.3.6.2 Deteksi Heteroskedastisitas .....	77
3.3.6.3 Deteksi Autokorelasi .....	77
3.3.7 Deteksi Normalitas .....	78
3.3.8 Pengujian Statistik .....	78
3.3.8.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	78
3.3.8.2 Uji F .....	79
3.3.8.3 Uji T .....	80
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS .....	81
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	81
4.1.1 Perkembangan PAD .....	85
4.1.2 Perkembangan DAU .....	86
4.1.3 Perkembangan DAK .....	87
4.1.4 Perkembangan DBH .....	88
4.1.5 Perkembangan Belanja Modal .....	89
4.1.6 Perkembangan IPM .....	90
4.2 Analisis Data .....	90
4.2.1 Uji LM_Test .....	91
4.2.2 Uji Hausman .....	91
4.2.3 Hasil Regresi .....	92
4.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	94
4.2.4.1 Deteksi Multikolinearitas .....	94
4.2.4.2 Deteksi Heteroskedastisitas .....	94
4.2.4.3 Deteksi Autokorelasi .....	95
4.2.4.4 Deteksi Normalitas .....	96
4.2.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	97
4.2.6 Uji F .....	97
4.2.7 Uji T .....	98
4.3 Interpretasi Hasil Analisis .....	99
4.3.1 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal .....	99
4.3.2 Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal .....	100
4.3.3 Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal .....	101
4.3.4 Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal .....	102
4.3.5 Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	103
BAB V. PENUTUP .....	104
5.1 Simpulan .....	104
5.2 Keterbatasan .....	105
5.3 Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
DAFTAR LAMPIRAN .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2004-2011 di Indonesia (Dalam milyar rupiah) .....	5
Tabel 1.2 Rasio Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus) Terhadap Total Pendapatan Daerah Di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 (%).....	7
Tabel 1.3 Belanja Modal Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 (dalam Juta Rupiah) .....	9
Tabel 1.4 Angka Harapan Hidup Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 .....	13
Tabel 1.5 Angka Melek Huruf Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 .....	14
Tabel 1.6 Rata – rata Lama Sekolah di Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 .....	14
Tabel 1.7 Pengeluaran Perkapita di Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 .....	14
Tabel 1.8 Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 .....	15
Tabel 2.1 Research Gap .....	60
Tabel 4.1 PAD Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Dalam Juta Rp) .....	85
Tabel 4.2 DAU Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Dalam Milyar Rp) ..	86
Tabel 4.3 DAK Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Dalam Juta Rp) .....	87
Tabel 4.4 DBH Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Dalam Juta Rp) .....	88
Tabel 4.5 Belanja Modal Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta (Dalam Milyar Rp) .....	89
Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta .....	90
Tabel 4.7 Hasil Uji LM_Test .....	91
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman .....	91
Tabel 4.9 Hasil Regresi Fixed Effect Model BM .....	92
Tabel 4.10 Hasil Regresi Fixed Effect Model IPM .....	93

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Parsial .....	94
Tabel 4.12 Hasil Uji White .....	94
Tabel 4.13 Durbin-Watson .....	95
Tabel 4.14 Hasil Uji Durbin-Watson .....	95
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas .....	96
Tabel 4.16 Uji F Variabel BM .....	97
Tabel 4.17 Uji F Variabel IPM .....	98
Tabel 4.18 Uji T Variabel BM .....	98
Tabel 4.19 Uji T Variabel IPM .....	99

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi .....	3
Gambar 1.2 Pengeluaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia Tahun 2007 – 2011 (dalam Juta Rupiah) .....	12
Gambar 2.1 Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI .....	30
Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wenger .....	40
Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah .....	41
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran .....	65
Gambar 4.1 Peta Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Mentah .....	109
Lampiran B Hasil Regresi .....	111
B.1 Hasil Regresi Model Pooled Least Square .....	111
B.2 Hasil Regresi Model Random Effect .....	112
B.3 Hasil Regresi Model Fixed Effect .....	114
Lampiran C Hasil Uji Pemilihan Model .....	116
C.1 Hasil Uji LM_Test .....	116
C.2 Hasil Uji Hausman .....	117
Lampiran D Hasil Uji Asumsi Klasik .....	118
D.1 Hasil Deteksi Multikolinearitas .....	118
D.2 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas .....	120
D.3 Hasil Deteksi Autokorelasi .....	121
D.4 Hasil Uji Normalitas .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaannya, dimana pemerintah kabupaten seharusnya sudah bukan lagi beban pemerintah pusat, adanya desentralisasi yang seharusnya menjadi wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan malah sebaliknya dimana daerah selalu bergantung dengan pusat. Adapun dengan terbitnya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang jelas menyatakan sistem pemerintah atau pelaksanaan pengelolaan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya telah digagas dan dilaksanakan sebelum tahun 2001 dalam pemerintahan Indonesia. Dengan adanya UU No. 5 yang diterbitkan tahun 1974 yang setelah itu diganti menjadi UU No. 22 tahun 1999 yang pada akhirnya disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004, karena UU No. 22 tahun 1999 menimbulkan berbagai macam permasalahan terutama sektor administrasi dalam pemerintahan tentang masalah penganggaran daerah (APBD). Dalam penjelasan tersebut diketahui bahwa pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan pemerintah sebagai jawaban dari tantangan di era globalisasi yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah disebutkan bahwa ada tiga asas yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

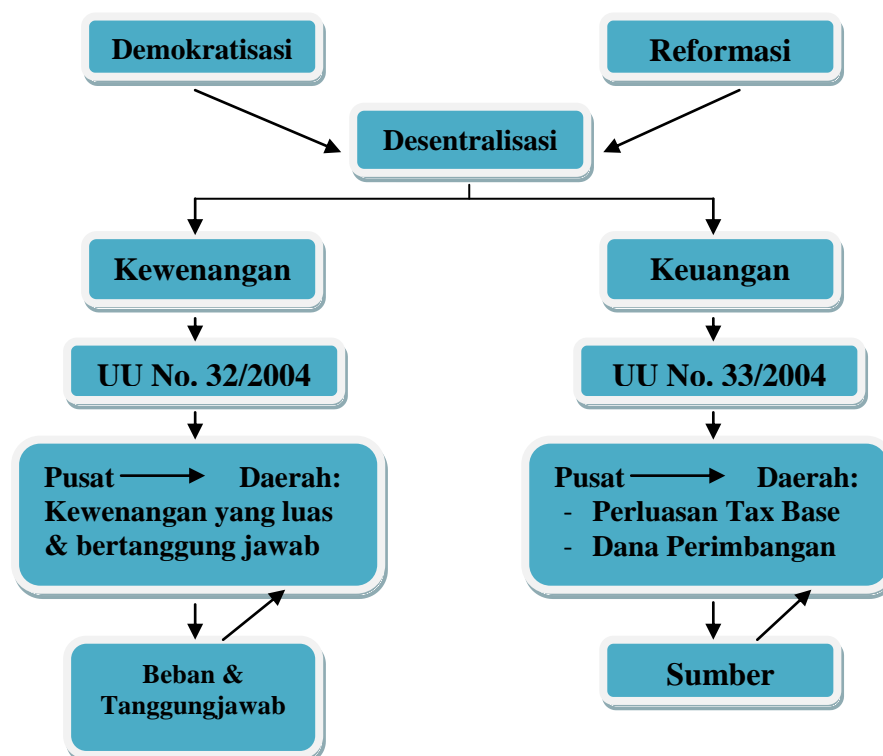
Dalam istilahnya yaitu daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan meningkatkan potensinya agar tidak bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sekaligus tidak menjadi beban pemerintah pusat.

Selain UU No. 22 Tahun 1999 juga diterbitkan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian juga disempurnakan menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah (Rudy Badrudin, 2012).

Otonomi daerah merupakan pelaksanaan dari ide desentralisasi, konsep desentralisasi terdiri dari tiga yaitu desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), dimana ketiganya harus berjalan beriringan dan dengan konsep yang jelas. Melalui otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Menurut Saragih dalam (Rudy Badrudin, 2012) sekaligus memberikan mamfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom, dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah daerah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain. Dalam kewenangannya dapat dilihat di gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1.1**  
**Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**  
**di Era desentralisasi**



Sumber: Joko Tri Haryanto, 2006

Inti dari desentralisasi adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai perwujudan dari demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sedangkan otonomi daerah sebagai wujud dari pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat (Nurjanna Ladjin, 2008)

Dalam mewujudkan kemandirian fiskal, menurut Halim (Nurjanna Ladjin, 2008) indikatornya adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah mampu mengoptimalkan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk membiayai pemerintahannya, dan (2) Ketergantungan kepada bantuan dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga peran pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (DBHPBP) harus dapat dimaksimalkan.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia selama 8 tahun belakangan ini memunculkan sebuah fakta, bahwa hampir sebagian besar wilayah di Indonesia belum siap dalam melaksanakan sistem desentralisasi dalam wujud otonomi daerah, ini timbul karena daerah belum mengoptimalkan peran PAD melainkan lebih dominannya dana transfer (dana perimbangan) dalam APBD yang selalu meningkat, ini menunjukkan ketergantungan pada pemerintah pusat.

Setiap tahunnya realisasi dana perimbangan semakin meningkat yang menunjukkan, banyak daerah masih bergantung terhadap bantuan dari pusat. Dana perimbangan ini didominasi oleh dana alokasi umum. Dalam 8 tahun terakhir tahun 2004 realisasi dana alokasi umum sebesar Rp. 82.130,90 milyar meningkat menjadi sebesar Rp. 225.553,70 milyar pada Tahun 2011. Dan realisasi dana perimbangan dari tahun 2004 sampai 2011 dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2004-2011 di Indonesia**  
**(Dalam milyar rupiah dan persen)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>Total dan perkembangan</b>
<b>2004</b>	<b>37,900.80 (31%)</b>	<b>82,130.90 (67%)</b>	<b>2,835.90 (2%)</b>	<b>122,867.60 ( -- )</b>
<b>2005</b>	<b>50,479.20 (35%)</b>	<b>88,765.40 (62%)</b>	<b>3,976.70 (3%)</b>	<b>143,221.30 (14%)</b>
<b>2006</b>	<b>64,900.30 (29%)</b>	<b>145,664.20 (66%)</b>	<b>11,566.10 (5%)</b>	<b>222,130.60 (36%)</b>
<b>2007</b>	<b>62,942.00 (26%)</b>	<b>164,787.40 (68%)</b>	<b>16,237.80 (7%)</b>	<b>243,967.20 (9%)</b>
<b>2008</b>	<b>78,420.20 (28%)</b>	<b>179,507.10 (64%)</b>	<b>20,787.30 (7%)</b>	<b>278,714.70 (12%)</b>
<b>2009</b>	<b>76,129.90 (27%)</b>	<b>186,414.10 (65%)</b>	<b>24,707.40 (9%)</b>	<b>287,251.50 (3%)</b>
<b>2010</b>	<b>89,618.40 (29%)</b>	<b>203,606.50 (65%)</b>	<b>21,138.40 (7%)</b>	<b>314,363.30 (9%)</b>
<b>2011</b>	<b>96,909.00 (26%)</b>	<b>225,553.70 (60%)</b>	<b>24,803.50 (7%)</b>	<b>374,246.20 (16%)</b>

Sumber : DJPK Laporan Realisasi APBD, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 terjadi fluktuasi dana perimbangan dari tahun 2004 sampai 2011, pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 3% dimana dana bagi hasil menjadi 62,942.00 milyar. Pada tahun 2009 terjadi kembali penurunan sebesar 1% dari 78,420,20 milyar ditahun 2008 menjadi 76,129.90 milyar ditahun 2009. Kondisi yang fluktuatif seperti penurunan dana bagi hasil pada tahun 2007 dan 2009, menandakan bahwa pemerintah kurang mampu untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang menjadi bagian pemerintah pusat seperti perolehan hak atas tanah dan bangunan serta sumber-sumber penerimaan non-pajak seperti penerimaan dari sumber daya alam sehingga terjadi penurunan dana bagi hasil.

Dana alokasi umum selama 8 tahun terakhir dari pelaksanaan otonomi daerah mengalami peningkatan mencapai 100% lebih, dimana pada tahun 2004 sebesar 82.130,90 milyar menjadi 225,553.70 milyar pada tahun 2011, hal yang sama juga ditunjukkan pada dana alokasi khusus yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari data tersebut maka terlihat jika masih sangat bergantungnya pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam Tabel 1.1 dalam realisasinya yang terus meningkat, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah di Indonesia juga akan mengalami ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dimana dari realisasi APBD tersebut dari sisi pengelolaan anggaran yang didapat dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH), yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah sebagai penopang utama, mencapai 70% dari pendapatan dan dana tersebut digunakan untuk pos yang tidak produktif. Dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Tengah No.8 Tahun 1992 dengan pembaruan Perda Provinsi Jawa Tengah No.21 Tahun 2003 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi membentuk kawasan kerjasama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan tersebut adalah Eks karesidenan Surakarta yang terdiri dari : Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.

Dalam perkembangan dari kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta, beberapa wilayah masih didominasi oleh bantuan pemerintah melalui DAU dan DAK. Hal ini yang menyebabkan masih bergantungnya pemerintah kab/kota eks Karesidenan Surakarta kepada bantuan pemerintah pusat.

**Tabel 1.2**  
**Rasio Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus) Terhadap Total Pendapatan Daerah Di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011 (%)**

Tahun	Boyolali	Karanganyar	Klaten	Sragen	Sukoharjo	Wonogiri	Surakarta
2004	77,05%	76,46%	78,18%	73,81%	81,40%	79,87%	61,18%
2005	73,94%	75,23%	78,67%	74,38%	74,43%	84,44%	58,37%
2006	82,04%	81,45%	87,22%	81,39%	80,89%	84,68%	68,66%
2007	80,46%	78,32%	85,27%	75,39%	81,77%	84,14%	66,57%
2008	81,35%	72,74%	82,66%	75,28%	79,90%	79,58%	60,15%
2009	78,44%	76,04%	80,91%	75,23%	80,24%	80,16%	65,06%
2010	70,08%	76,76%	75,16%	69,45%	77,14%	70,23%	61,57%
2011	64,66%	60,92%	64,09%	63,04%	60,47%	65,14%	49,42%
<b>rata-rata</b>	<b>76,00%</b>	<b>74,74%</b>	<b>79,02%</b>	<b>73,50%</b>	<b>77,03%</b>	<b>78,53%</b>	<b>61,37%</b>

Sumber : DJPK Laporan Realisasi APBD, diolah

Dalam Tabel 1.2, pada tahun 2007 sampai 2011 bantuan pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di kab/kota eks karesidenan surakarta yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta sangat fluktuatif dimana dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Terlihat dalam rasio bantuan pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah di kab/kota eks karesidenan surakarta masih terlalu tinggi dimana dari rata-rata semuanya masih menunjukkan bantuan pemerintah pusat paling mendominasi diantaranya diatas 50%, dari Kabupaten Boyolali dengan rata-rata 75,00%,

Kabupaten Karanganyar 74,74%, Kabupaten Klaten 79,02%, Kabupaten Sragen 73,50%, Kabupaten Sukoharjo 77,03%, Kabupaten Wonogiri 78,53%, dan Kota Surakarta 61,37%. Dari ke tujuh kab/kota eks Karesidenan Surakarta rasio bantuan pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah yang tertinggi adalah kabupaten klaten dengan rata-rata 79,02%.

Selain kemandirian fiskal, salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah indeks pembangunan manusia, dimana manusia adalah sebagai tujuan sekaligus pelaku ekonomi. Pemerintah yang mandiri mampu membiayai pembangunannya sendiri sehingga dapat menciptakan pembangunan manusia. Sekaligus dapat diukur melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM).

Keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antar daerah menyebabkan setiap kabupaten/kota di eks karesidenan surakarta memiliki kemampuan yang berbeda dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Dengan demikian terdapat perbedaan dalam kemampuan kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan daerahnya, sehingga angka IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan antar kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta juga berbeda antar daerah.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah (Abimanyu, 2005). Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga

menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan tingginya bantuan pemerintah pusat seharusnya tinggi juga pengeluaran pemerintah kabupaten/kota eks karesidenan surakarta melalui belanja modal terutama dalam sektor infrastruktur, akan tetapi pemerintah kabupaten/kota eks karesidenan surakarta dalam alokasi di sektor infrastruktur masih kecil. Berikut pengeluaran pemerintah melalui belanja modal

**Tabel 1.3**  
**Belanja Modal Kab/Kota Eks Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2004 – 2011 (dalam Juta Rupiah)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Boyolali</b>	<b>Karanganyar</b>	<b>Klaten</b>	<b>Sragen</b>	<b>Sukoharjo</b>	<b>Wonogiri</b>	<b>Surakarta</b>
<b>2004</b>	<b>49.428,77</b>	<b>42.525,06</b>	<b>29.841,86</b>	<b>43.164,37</b>	<b>29.516,31</b>	<b>70.184,96</b>	<b>13.492,01</b>
<b>2005</b>	<b>57.414,55</b>	<b>63.466,26</b>	<b>31.048,53</b>	<b>57.196,31</b>	<b>31.152,65</b>	<b>69.302,79</b>	<b>10.175,44</b>
<b>2006</b>	<b>74.010,25</b>	<b>79.250,65</b>	<b>83.645,56</b>	<b>113.623,24</b>	<b>75.652,00</b>	<b>154.512,19</b>	<b>63.883,25</b>
<b>2007</b>	<b>158.187,03</b>	<b>107.531,63</b>	<b>138.749,67</b>	<b>174.442,69</b>	<b>123.087,29</b>	<b>92.138,57</b>	<b>127.254,38</b>
<b>2008</b>	<b>124.533,01</b>	<b>149.886,54</b>	<b>144.478,23</b>	<b>170.554,06</b>	<b>112.595,42</b>	<b>144.349,17</b>	<b>163.614,68</b>
<b>2009</b>	<b>86.596,63</b>	<b>61.255,82</b>	<b>68.465,70</b>	<b>102.236,97</b>	<b>54.722,16</b>	<b>84.543,65</b>	<b>81.881,49</b>
<b>2010</b>	<b>100.101,22</b>	<b>53.705,71</b>	<b>40.141,79</b>	<b>86.363,57</b>	<b>99.921,23</b>	<b>103.311,53</b>	<b>79.762,50</b>
<b>2011</b>	<b>1.384.370,23</b>	<b>86.229,12</b>	<b>130.545,72</b>	<b>70.836,78</b>	<b>97.153,87</b>	<b>111.320,43</b>	<b>128.443,15</b>

Sumber : DJPK Laporan Realisasi APBD

Menurut UNDP (1996) Perbaikan pengalokasian dana untuk belanja modal selain belanja rutin ikut menopang pebaikan kesejahteraan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya.

Tujuan lain dari pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dan mendorong prakarsa dan kemampuan daerah sehingga daerah menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia, terutama kabupaten/kota sebagai motor pelaksana kebijakan tersebut. Dengan demikian daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia. Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang begitu luas bagi daerah. Hal ini di satu sisi merupakan berkat, namun disisi lain sekaligus merupakan beban yang pada saatnya nanti akan menuntut kesiapan daerah untuk

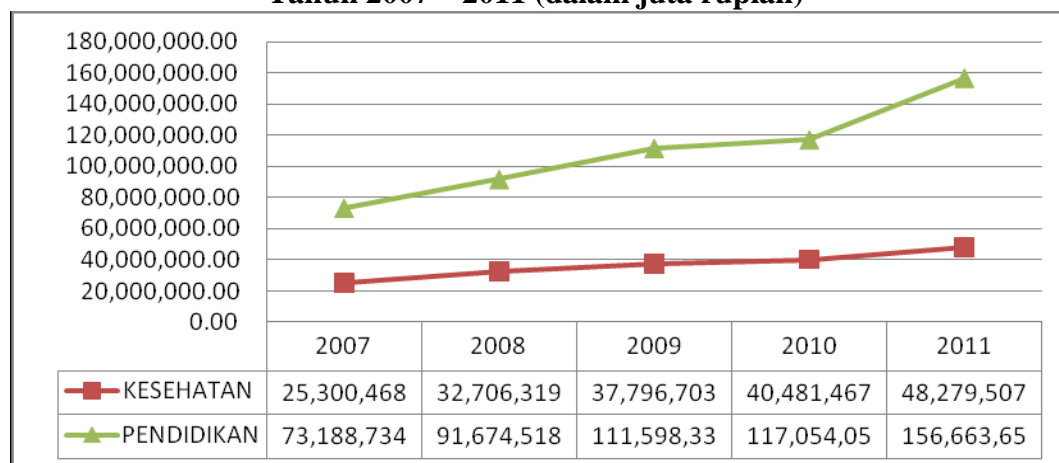
dapat melaksanakannya. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemennya (Darumurti, 2003)

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Sidik, 2002). Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi mempunyai tujuan akhir untuk membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani et.al., 2005).

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001).

Implikasi hubungan fiskal model federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka menggalakkan otonomi regional dan untuk memperbaiki infrastruktur lokal. Transfer dari pemerintah pusat ini akan dibelanjakan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman dan sektor – sektor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Sriningsih dan Muadi Yasin (2009) dalam ( Rudy Badrudin, 2012 ), dalam federalisme fiskal disebutkan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pentingnya *revenue* dan *expenditure* antar pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Berikut data pengeluaran pemerintah disektor pendidikan dan kesehatan

**Gambar 1.2**  
**Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia**  
**Tahun 2007 – 2011 (dalam juta rupiah)**



Sumber: DJPK, Depkeu 2012

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat dari tahun ke tahun baik pengeluaran untuk kesehatan maupun pengeluaran untuk pendidikan mengalami peningkatan. Pengeluaran untuk sektor kesehatan pada tahun 2008 meningkat

sebesar 29,27 persen, tetapi persentase penambahan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan sebesar 15,56 persen dan 7,10 persen. Selanjutnya untuk tahun 2011 meningkat sebesar 19,26 di angka 48.279.507, tetapi peningkatan tersebut lebih kecil dibanding dengan peningkatan tahun 2008. Keadaan tersebut juga terjadi pada sektor pendidikan yang mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 25,26 persen, tetapi pada tahun 2009 dan 2010 persentase penambahan pengeluaran sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar 21,73 persen dan 4,89 persen. Selanjutnya penambahan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 33,84 persen. Dari angka pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa ada usaha yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pelayanan publik pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Berikut adalah data dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita kab/kota eks karesidenan surakarta 5 tahun terakhir dari tahun 2004 – 2011.

**Tabel 1.4**  
**Angka Harapan Hidup Kab/Kota eks Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2004 – 2011**

<b>kab/kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Boyolali</b>	<b>69,60</b>	<b>70,00</b>	<b>70,10</b>	<b>70,11</b>	<b>70,24</b>	<b>70,30</b>	<b>70,37</b>	<b>70,43</b>
<b>Karanganyar</b>	<b>71,80</b>	<b>71,80</b>	<b>71,90</b>	<b>71,92</b>	<b>72,05</b>	<b>72,13</b>	<b>72,20</b>	<b>72,38</b>
<b>Klaten</b>	<b>69,80</b>	<b>70,70</b>	<b>70,80</b>	<b>70,93</b>	<b>71,15</b>	<b>71,33</b>	<b>71,50</b>	<b>71,67</b>
<b>Sragen</b>	<b>71,50</b>	<b>71,70</b>	<b>71,80</b>	<b>71,94</b>	<b>72,18</b>	<b>72,37</b>	<b>72,56</b>	<b>72,75</b>
<b>Sukoharjo</b>	<b>69,30</b>	<b>69,70</b>	<b>70,00</b>	<b>70,04</b>	<b>70,11</b>	<b>70,17</b>	<b>70,23</b>	<b>70,29</b>
<b>Wonogiri</b>	<b>71,60</b>	<b>71,90</b>	<b>72,00</b>	<b>72,04</b>	<b>72,14</b>	<b>72,21</b>	<b>72,28</b>	<b>72,35</b>
<b>Surakarta</b>	<b>71,10</b>	<b>71,70</b>	<b>71,80</b>	<b>71,84</b>	<b>71,98</b>	<b>72,07</b>	<b>72,16</b>	<b>72,25</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

**Tabel 1.5**  
**Angka Melek Huruf Kab/Kota eks Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2004 – 2011**

<b>kab/kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Boyolali</b>	<b>81,90</b>	<b>84,50</b>	<b>85,10</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>85,97</b>	<b>85,97</b>	<b>87,96</b>
<b>Karanganyar</b>	<b>78,90</b>	<b>81,50</b>	<b>82,00</b>	<b>84,15</b>	<b>84,76</b>	<b>84,96</b>	<b>86,91</b>	<b>88,80</b>
<b>Klaten</b>	<b>82,80</b>	<b>85,50</b>	<b>86,90</b>	<b>89,28</b>	<b>89,28</b>	<b>89,70</b>	<b>89,90</b>	<b>89,92</b>
<b>Sragen</b>	<b>75,30</b>	<b>73,00</b>	<b>76,30</b>	<b>81,05</b>	<b>81,15</b>	<b>82,26</b>	<b>84,36</b>	<b>84,41</b>
<b>Sukoharjo</b>	<b>82,20</b>	<b>87,20</b>	<b>87,20</b>	<b>89,75</b>	<b>90,36</b>	<b>90,38</b>	<b>90,69</b>	<b>90,72</b>
<b>Wonogiri</b>	<b>77,40</b>	<b>79,10</b>	<b>82,00</b>	<b>82,03</b>	<b>82,03</b>	<b>82,14</b>	<b>82,18</b>	<b>83,50</b>
<b>Surakarta</b>	<b>94,60</b>	<b>95,80</b>	<b>96,60</b>	<b>96,58</b>	<b>96,66</b>	<b>96,67</b>	<b>96,68</b>	<b>96,71</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

**Tabel 1.6**  
**Rata – rata Lama Sekolah di Kab/Kota eks Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2004 – 2011**

<b>kab/kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Boyolali</b>	<b>6,60</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>7,29</b>	<b>7,37</b>	<b>7,42</b>
<b>Karanganyar</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,05</b>	<b>7,17</b>	<b>7,39</b>	<b>7,41</b>
<b>Klaten</b>	<b>7,30</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,75</b>	<b>7,93</b>	<b>8,27</b>	<b>8,28</b>
<b>Sragen</b>	<b>6,00</b>	<b>5,90</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>6,50</b>	<b>6,88</b>	<b>6,99</b>	<b>7,02</b>
<b>Sukoharjo</b>	<b>7,90</b>	<b>7,80</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,15</b>	<b>8,36</b>	<b>8,36</b>	<b>8,52</b>
<b>Wonogiri</b>	<b>5,90</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,29</b>	<b>6,32</b>	<b>6,35</b>
<b>Surakarta</b>	<b>9,80</b>	<b>9,80</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,15</b>	<b>10,32</b>	<b>10,32</b>	<b>10,34</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

**Tabel 1.7**  
**Pengeluaran Perkapita di Kab/Kota eks Karesidenan Surakarta**  
**Tahun 2004 – 2011**

<b>kab/kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Boyolali</b>	<b>590,60</b>	<b>619,50</b>	<b>621,40</b>	<b>622,37</b>	<b>626,14</b>	<b>629,49</b>	<b>632,00</b>	<b>632,19</b>
<b>Karanganyar</b>	<b>617,10</b>	<b>637,00</b>	<b>640,90</b>	<b>640,92</b>	<b>645,79</b>	<b>647,87</b>	<b>647,94</b>	<b>649,70</b>
<b>Klaten</b>	<b>607,30</b>	<b>637,20</b>	<b>637,40</b>	<b>638,07</b>	<b>641,86</b>	<b>643,92</b>	<b>644,21</b>	<b>646,39</b>
<b>Sragen</b>	<b>592,70</b>	<b>620,20</b>	<b>620,30</b>	<b>621,57</b>	<b>626,26</b>	<b>627,15</b>	<b>628,04</b>	<b>630,61</b>
<b>Sukoharjo</b>	<b>607,00</b>	<b>635,20</b>	<b>637,10</b>	<b>639,00</b>	<b>643,38</b>	<b>644,60</b>	<b>646,94</b>	<b>649,96</b>
<b>Wonogiri</b>	<b>607,60</b>	<b>631,50</b>	<b>633,00</b>	<b>635,55</b>	<b>639,55</b>	<b>644,24</b>	<b>647,21</b>	<b>649,51</b>
<b>Surakarta</b>	<b>607,90</b>	<b>638,40</b>	<b>639,00</b>	<b>641,60</b>	<b>646,45</b>	<b>648,23</b>	<b>652,43</b>	<b>655,77</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

**Tabel 1.8**  
**Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2004 – 2011**

<b>kab/kota</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Boyolali</b>	<b>68,50</b>	<b>69,00</b>	<b>69,40</b>	<b>69,63</b>	<b>69,99</b>	<b>70,44</b>	<b>70,72</b>	<b>71,25</b>
<b>Karanganyar</b>	<b>70,50</b>	<b>70,70</b>	<b>71,10</b>	<b>71,59</b>	<b>72,21</b>	<b>72,55</b>	<b>73,19</b>	<b>73,82</b>
<b>Klaten</b>	<b>71,00</b>	<b>71,40</b>	<b>71,80</b>	<b>72,48</b>	<b>72,93</b>	<b>73,41</b>	<b>73,83</b>	<b>74,10</b>
<b>Sragen</b>	<b>66,10</b>	<b>66,60</b>	<b>67,80</b>	<b>68,98</b>	<b>69,57</b>	<b>70,27</b>	<b>71,00</b>	<b>71,33</b>
<b>Sukoharjo</b>	<b>70,70</b>	<b>71,20</b>	<b>71,70</b>	<b>72,46</b>	<b>73,01</b>	<b>73,29</b>	<b>73,57</b>	<b>73,97</b>
<b>Wonogiri</b>	<b>68,40</b>	<b>69,00</b>	<b>69,90</b>	<b>70,11</b>	<b>70,47</b>	<b>71,04</b>	<b>71,33</b>	<b>71,86</b>
<b>Surakarta</b>	<b>75,80</b>	<b>76,00</b>	<b>76,40</b>	<b>76,58</b>	<b>77,16</b>	<b>77,49</b>	<b>77,86</b>	<b>78,18</b>
<b>Jawa Tengah</b>	<b>68,90</b>	<b>69,80</b>	<b>70,30</b>	<b>70,92</b>	<b>71,60</b>	<b>72,10</b>	<b>72,49</b>	<b>72,94</b>

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka

Dalam Tabel 1.8, dari data 8 tahun terakhir yaitu 2004 – 2011 pada kabupaten/ kota eks Karesidenan Surakarta hampir semuanya berada pada nilai antara 65 sampai 80, sekaligus dalam perkembangannya indeks pembangunan manusia pada 7 kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta yang paling rendah adalah Kabupaten Sragen dengan nilai 66,10 pada tahun 2004 tetapi pada tahun 2011 Kabupaten Boyolali menjadi yang terendah dengan nilai 71,25, dan yang tertinggi adalah Kota Surakarta dengan nilai 78,18 pada tahun 2011, sekaligus juga menjelaskan bahwa dari 7 kabupaten/kota eks karesidenan surakarta masih ada dua kabupaten yang memiliki IPM dibawah provinsi, yaitu boyolali dan sragen. Selain itu melihat dari peningkatan setiap tahunnya, tingkat peningkatan IPM kabupaten/kota eks karesidenan surakarta masih berada dibawah jawa tengah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian fiskal sekaligus melakukan pembangunan, secara umum terlihat bahwa kemandirian dalam keuangan daerah eks karesidenan surakarta masih

lemah, hal ini dibuktikan dengan masih mendominasinya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam total pendapatan daerah di beberapa wilayah yang lebih dari setengahnya yang meliputi kabupaten boyolali, kabupaten karanganyar, kabupaten klaten, kabupaten sragen, kabupaten sukoharjo, kabupaten wonogiri, dan kota surakarta, sekaligus peran dari pendapatan asli daerah yang masih kurang, selain itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mewujudkan kemandirian dalam keuangan daerah.

Tujuan lain dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dan mendorong kemampuan daerah sehingga daerah menjadi lebih mandiri untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia. Dengan demikian daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Daya Beli.

Penyediaan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas modal manusia. Apabila seseorang memiliki pendidikan dan juga kesehatan yang baik maka orang tersebut memiliki kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan pendapatannya. Dengan peningkatan pendapatan yang diterima oleh anggota masyarakat ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Modal manusia berupa pendidikan dan kesehatan diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan ( Todaro, 2006 )

Pentingnya modal manusia ini sudah sangat dipahami oleh para ahli ekonomi dan pengambil kebijakan di Indonesia. Sehingga kewenangan untuk menyediakan layanan dasar dalam modal manusia pada masa desentralisasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (terdesentralisasi). Kesadaran akan pentingnya sektor kesehatan dan pendidikan ini tertuang dalam UU no.23 tahun 2003 tentang pengalokasian anggaran minimal 15% dari APBD untuk sektor kesehatan, dan 20% untuk sektor pendidikan. Efektifitas pencapaian tujuan dalam peningkatan kualitas modal manusia ini tentu sangat tergantung pada dukungan pemerintah dalam konteks penganggaran investasi fasilitas dasar pendidikan, kesehatan, dan pemberian subsidi khususnya bagi masyarakat miskin (Agustina, 2011).

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah ([www.ksap.org](http://www.ksap.org)). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh

pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto, 2009).

Menurut (Mahocca, 2012) pada dasarnya UU No. 32 tahun 2004 dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah karena tiap daerah memiliki potensi berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang beraneka

ragam. Lalu muncul permasalahan yang kompleks antar pemerintah daerah dalam hal pendanaan biaya pembangunan, karena tiap daerah tidak cukup untuk memenuhi biaya pembangunan jika hanya mengandalkan sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lalu pemerintah mengeluarkan UU No. 33 tahun 2004 untuk mengurangi ketimpangan dalam hal pendanaan biaya pembangunan serta mengurangi ketimpangan fiskal vertikal (pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) yang berisi tentang dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No. 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” menyebutkan bahwa Ketiga komponen dalam Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan utuh. Sedangkan PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Penelitian sebelumnya telah diteliti oleh Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (2009). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia, Sampel yang digunakan adalah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2004 sampai 2006. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan belanja modal juga berpengaruh terhadap IPM.

Kusreni dan Suhab (2009) dalam “Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”, melakukan penelitian terhadap 22 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasar data panel selama kurun waktu 2003-2007. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan *random effect*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel yang digunakan meliputi variabel PAD dan DBH (kapasitas fiskal), belanja modal daerah dan pembiayaan daerah terhadap variabel dependen IPM (kesejahteraan masyarakat). Dari estimasi variabel-variabel diatas diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan.

Penelitian mengenai pengaruh kapasitas fiskal terhadap IPM juga dilakukan oleh Pambudi (2008). Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat” menggunakan data panel 22 kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode tahun 2002-2006. Metode yang dipakai menggunakan metode analisis data panel yang terdiri dari model *pooled least square (PLS)*, *fixed effect* dan *random effect*. Analisis yang dilakukan menggunakan tiga estimasi yaitu pengaruh PAD terhadap DAU, pengaruh kemandirian fiskal (rasio PAD/TPD) terhadap IPM, dan pengaruh komponen PAD (pajak, retribusi dan bagi hasil

BUMD) terhadap IPM. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peningkatan PAD berpengaruh positif terhadap IPM.

Pujiati (2008) dengan analisisnya yaitu pengaruh PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah karesidenan semarang, jenis data yang digunakan adalah data panel. Data time series dari tahun 2002 – 2006 dan obyeknya adalah 6 kabupaten/kota di wilayah karesidenan semarang. Model yang digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi dalam penelitian ini adalah FEM. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode GLS (Generalized Least Squares). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian juga dilakukan oleh Decta Pitron Lugastoro (2013) dengan “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur” dengan hasil Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin

besar kemampuan DAU dalam membiaya belanja modal akan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia, rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.

Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Melalui PAD dan dana perimbangan berupa DAU, DAK, dan DBH. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya, karena indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan desentralisasi, dalam hal ini mengenai keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Daerah memperoleh penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan lain-lain yang sah, namun hal ini tentu akan menjadi kendala bagi daerah yang memiliki keterbatasan akan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Daerah dengan sumber daya yang terbatas tentu akan sulit untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal dalam pelaksanaan desentralisasi oleh karenanya masih membutuhkan bantuan dari pusat yang cukup besar yaitu berupa DAU, DAK, DBH untuk membiayai pembangunannya.

Beragamnya ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta menyebabkan kemampuan antar kabupaten/kota dalam membiayai pembangunannya juga beragam. Perbedaan kemampuan pembiayaan pembangunan menyebabkan tingkat kemandirian fiskal antar daerah yang juga berbeda, hal ini akan menyebabkan keberagaman dan ketimpangan pula dalam menghasilkan pembangunan manusia sebagai sasaran akhir pembangunan daerah yang diterjemahkan melalui indeks pembangunan manusia kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.

Dengan hal itu, alokasi belanja daerah memainkan peranan yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh

pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk digunakan belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat, (Fhino dan Adi, 2009). Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan tujuannya untuk melaksanakan pembangunan daerah di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta sekaligus menghasilkan pembangunan manusia melalui nilai indeks pembangunan manusia yang terdiri dari angka melek huruf, angka harapan hidup, dan daya beli. yaitu untuk melihat seberapa jauh tingkat kesejahteraan manusia, dimana manusia adalah tujuan sekaligus pelaksana dalam pembangunan daerah, seperti dalam tabel 1.8 yang menjelaskan bahwa IPM di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta untuk peningkatan setiap tahunnya masih berada dibawah jawa tengah, dimana dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta?

3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta?
4. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.
4. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.
5. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta dalam menyusun kebijakannya guna meningkatkan potensi dan sumber-sumber penerimaan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia.

2. Sebagai referensi kepada peneliti lain guna mengembangkan dan menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis.

##### **BAB III : Metode Penelitian**

Merupakan metode penelitian, berisi tentang uraian variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV: Hasil dan Pembahasan**

Merupakan hasil dan pembahasan, terdiri dari uraian analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Merupakan penutup yang memuat simpulan hasil analisis data dan pembahasan, keterbatasan dari penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Desentralisasi fiskal telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan daerah dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tuntutan desentralisasi fiskal tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di pulau jawa dan luar pulau jawa serta antara Indonesia barat dan Indonesia timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan wilayah menurut Waluyo dalam (Rudy Badrudin, 2012)

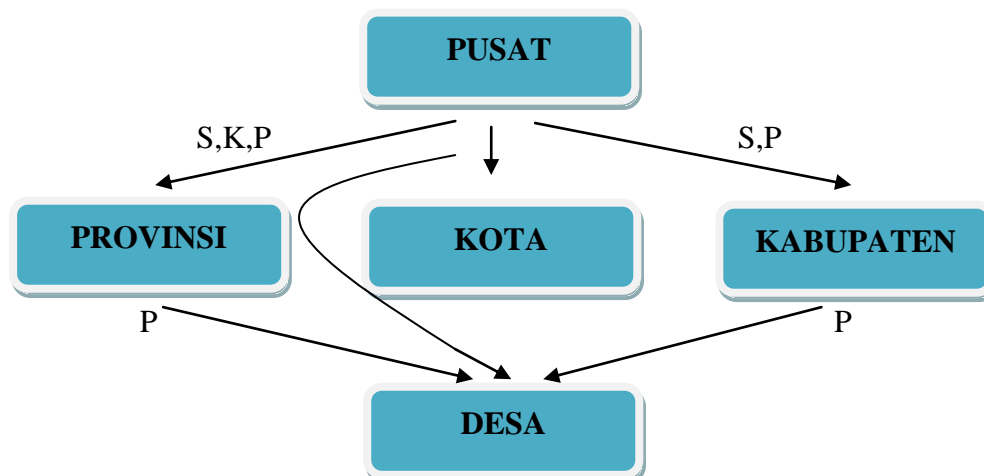
##### **2.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Pengertian otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan, otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi nonpemerintah.

Beragamnya daerah di Indonesia yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, kecamatan, dan desa/kelurahan membutuhkan sistem yang mampu mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah kaya membantu daerah miskin. Itulah sistem otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan penjelasan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab. (1) Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi layanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Prinsip otonomi daerah yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. (3) Prinsip otonomi daerah yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang (desentralisasi) berbarengan dengan

pelimpahan wewenang (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 (Rudy Badrudin, 2012).

**Gambar 2.1**  
**Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia**



*Sumber : Kuncoro dalam (Rudy Badrudin, 2012)*

Keterangan:

S: Desentralisasi (penyerahan wewenang) = APBD

K: Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang) = sentralisasi dari APBN

P: Tugas Pembantuan (sentralisasi dari APBN)

Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri. Dalam konteks ini, otonomi harus dipahami secara fungsional, artinya orientasi otonomi seharusnya pada upaya pemaksimalan fungsi pemerintahan, yaitu layanan, pengaturan, dan pemberdayaan agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa politis, dalam konteks hubungan pusat-daerah, otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur sistem administrasi, birokrasi, keuangan, kebijakan publik, dan hal-hal lain dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Adanya

otonomi daerah, lebih memungkinkan sebuah pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.

Menurut Ter-Minassian (Widhi, 2011) bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya. Serta menjamin kuantitas maupun kualitas dalam penyediaan pelayanan publik. Jadi desentralisasi disini merupakan alat untuk mendekatkan peran pemerintah terhadap masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara garis besar desentralisasi dibedakan menjadi tiga jenis oleh Litvack, yaitu :

1. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar dalam mengambil keputusan;
2. Desentralisasi administrasi, yaitu pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan;
3. Desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan untuk menggali sumber pendapatan, menentukan belanja rutin dan investasi

Ketiga jenis ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dimana desentralisasi politik merupakan ujung tombak dalam mewujudkan demokrasi. Desentralisasi administrasi adalah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Desentralisasi fiskal memiliki fungsi mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi dalam bidang keuangan sehingga apabila ketiga jenis berjalan dengan baik dan searah maka tujuan utama dari desentralisasi yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

### 2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama di antara level pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi setiap daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah sebagai pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan desentralisasi prinsip efisiensi menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau layanan publik harus dikelola secara efisien, namun menghasilkan output yang maksimal. Hal penting lainnya yang harus dipahami adalah desentralisasi fiskal di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititik beratkan pada desentralisasi untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menjaga

keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kessatuan Republik Indonesia (Rudy Badrudin, 2012).

Menurut Halim (Nurjanna Ladjin, 2008) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut P.Musgrave dan R.musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain :

$$1) \frac{PAD}{TPD} \quad (2.1)$$

$$2) \frac{DBHPBP}{TPD} \quad (2.2)$$

$$3) \frac{\text{SUM}}{\text{TPD}} \quad (2.3)$$

Selain itu dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain:

$$4) \frac{\text{PAD}}{\text{TKD}} \quad (2.4)$$

$$5) \frac{\text{PAD}}{\text{KR}} \quad (2.5)$$

$$6) \frac{\text{PAD+DBHPBP}}{\text{TKD}} \quad (2.6)$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBHPBP : Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD : Total Penerimaan Daerah

TKD : Total Pengeluaran Daerah

KR : Pengeluaran Rutin

SUM : Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat kemandirian fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri, akan

menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

### **2.1.3 Peranan Pemerintah**

Dalam pelaksanaan perekonomian di suatu negara, peranan pemerintah sangatlah penting. Menurut Adam Smith (Guritno,2001), mengemukakan teori tentang peran pemerintah. Menurut Smith, peran pemerintah hanya memiliki tiga fungsi :

1. Fungsi pemerintahan untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan
3. Fungsi pemerintahan untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan (Guritno,2001), yaitu :

1. Peranan alokasi

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber ekonomi dapat lebih efisien. Dalam hal ini pemerintah dapat mengatur barang publik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berapa anggaran untuk menyediakan barang publik tersebut guna menunjang dan meningkatkan perekonomian. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang

publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli.

## 2. Peranan distribusi

Peranan pemerintah dalam bidang distribusi adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Hal ini dikarenakan distribusi kekayaan yang ditimbulkan sistem pasar dirasa tidak adil sehingga perlu adanya peran pemerintah. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilihan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Masalah keadilan tidak sepenuhnya dalam lingkup ilmu ekonomi karena masalah keadilan tergantung pandangan masyarakat dalam menilai keadilan tersebut. Sehingga disini adanya peran masyarakat dalam menentukan keadilan melalui wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kebijakan publik yang diinginkan. Kemudian oleh pemerintah mengatur distribusi pendapatan melalui instrument kebijakan fiskal maupun moneter agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin.

## 3. Peranan stabilisasi

Dalam bidang stabilisasi, peran pemerintah adalah sebagai alat stabilisasi perekonomian. Hal ini diakibatkan apabila perekonomian

diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan perekonomian yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Dalam perkembangannya mengenai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Adolf Wagner (Rudy Badrudin, 2012), pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang melakukan pembiayaan. Adolf wagner menyebut dengan *The Law of Ever Increasing State Activity* atau hukum selau meningkatnya kegiatan negara atau hukum makin meningkatnya kebutuhan negara atau hukum makin meningkatnya pengeluaran negara. Pengeluaran negara tersebut dalam arti relatif, yaitu membandingkan pengeluaran negara dengan PDRB dan atau membandingkan dengan pengeluaran sektor swasta

Menurut Soepangat dalam (Rudy Badrudin, 2012), peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi karena upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang berupa subsidi dan penyediaan barang swasta untuk golongan lemah menjadi kewajiban

pemerintah. Demikian pula dengan penyediaan barang dan jasa publik bagi masyarakat akan bermanfaat bagi yang membutuhkannya sehingga penyediaan berbagai barang dan jasa publik yang dianggarkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan (Guritno,2001), yaitu :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pengembangan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar disebabkan pemerintah harus menyediakan infrastruktur. Pada tahap menengah, investasi yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas, tetapi peran investasi pihak swasta mulai meningkat. Peranan dari pemerintah juga masih tetap besar, tetapi investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini menyebabkan meningkatnya jumlah dan kualitas barang publik yang disediakan sebab terjadi kegagalan pasar. Pada tahap lanjut, aktivitas pengeluaran pemerintah akan bergeser ke arah aktivitas sosial.

Menurut Musgrave, presentase investasi swasta yang dilakukan pada sebuah pembangunan terhadap GNP akan semakin besar

dibandingkan dengan presentase investasi pemerintah terhadap GNP yang lebih kecil.

## 2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah

Menurut Wagner, presentase pengeluaran pemerintah dalam perkembangannya akan semakin meningkat terhadap GNP. Sehingga muncul Hukum Wagner, dimana dalam sebuah perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat.

Pandangan Wagner didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (*Organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{2PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn} \quad (2.7)$$

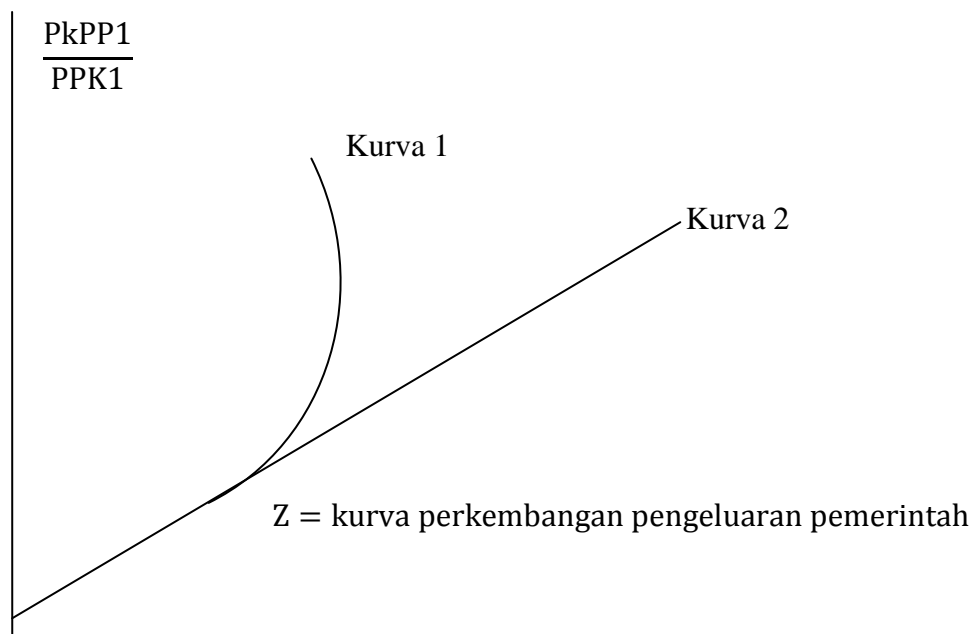
Keterangan : PkPP : Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini menunjukkan kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner**



*Sumber : Guritno (2001)*

### 3. Teori peacock dan wiseman

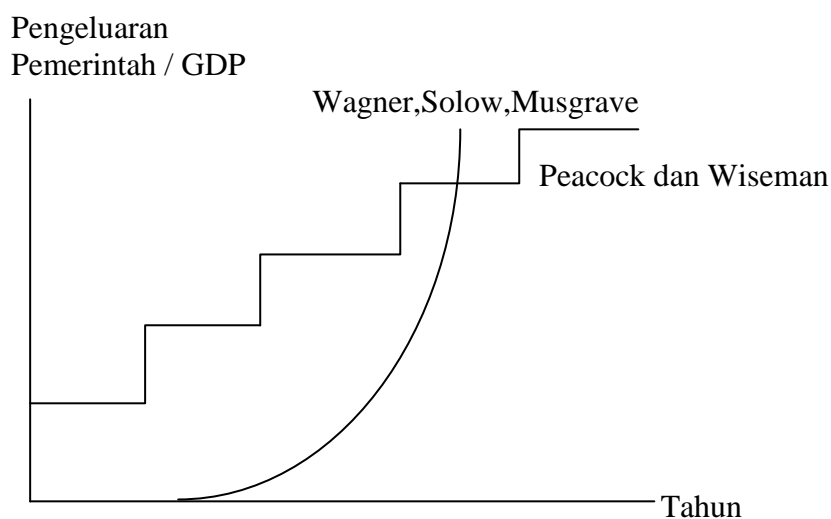
Teori ini didasari bahwa pemerintah akan berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar itu. Dimana masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu masyarakat memahami bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga masyarakat bersedia untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pajak.

Inti dari teori Peacock dan Wiseman sebagai berikut, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak akan meningkat walaupun tarif pajak tidak meningkat. Meningkatnya pajak

menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat sehingga dalam keadaan normal, GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang meningkat akan menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat.

Dalam perkembangannya, pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman tidak berbentuk suatu garis lurus tetapi berbentuk seperti tangga. Seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 2.3**  
**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**



*Sumber : Guritno (2001)*

Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan memerlukan dukungan dari segala pihak, salah satunya anggaran untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Alokasi dana ini digunakan oleh pemerintah guna membangun infrastruktur yang penting yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Peningkatan ini akan meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga bisa

membiayai kebutuhannya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

#### **2.1.5 Penerimaan Pemerintah**

Pada umumnya penerimaan pemerintah (Guritno,2001) dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya berasal dari pinjaman dalam negeri atau luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang dan lain-lain.

Penerimaan pemerintah lainnya adalah dari pajak, contohnya pajak penghasilan. Penerimaan dari pajak ini selalu mendapat perhatian lebih karena sektor pajak menimbulkan dua hal akibat dari adanya aktivitas pemerintah yaitu : (1) siapa yang membayar pajak? dan (2) siapa yang pada akhirnya menderita beban pajak?.

Penerimaan pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan. Pembiayaan pembangunan bersumber dari dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu : (Rahardjo Adisasmita, 2011)

##### **1. Tabungan masyarakat**

Tabungan masyarakat tergantung dari kemampuan masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatannya yang tidak untuk konsumsi. Apabila pendapatan masyarakat tinggi maka tabungan masyarakat pun juga tinggi

## 2. Tabungan pemerintah

Tabungan pemerintah merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan dalam negeri ada dua bagian, yaitu (1) Penerimaan minyak bumi dan gas dan (2) penerimaan nonmigas atau penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak.

Penerimaan pemerintah dari luar negeri tidak terkait langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun pemerintah pusat banyak mengambil manfaat dari adanya bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah. Penerimaan dari luar negeri contohnya pinjaman luar negeri, bantuan pembangunan resmi serta penanaman modal asing.

### **2.1.6 Anggaran Pemerintah**

Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi. Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini akan bekerja lebih kerass dan berusaha meyakinkan para pemilih bahwa kontribusinya terhadap pembeyaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, semakin meningkatnya perkembangan kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah dalam porsinya terhadap pendapatan nasional (GNP). Hal ini sejalan dengan pendapat adolf wagner yang mengemukakan law of ever increasing state activity dan sudah diuji pula oleh peacock dan wiseman, menurut soepangat dalam (Rudy Badrudin, 2012)

Berdasarkan law of ever increasing state activity, maka peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional nampak dengan disusunnya anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD). Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, dalam pengertiannya sebagai berikut :

#### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian tentang APBN didasarkan pada UUD 1945 pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

#### 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam atuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama dengan fungsi dan tujuan penyusunan APBN, hanya dalam APBD ruang

lingkupnya yang berbeda. APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala-kepala daerah atau gubernur dan bupati/walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, (Rudy Badrudin, 2012).

### **2.1.7 Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Persoalan pemerintah daerah banyak kesamaan dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang keuangan, masalah utama adalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan, sebagian besar sumber keuangan daerah berasal dari pemerintah pusat, hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah tercermin oleh kebijakan fiskal daerah tersebut, sehingga kebijakan keuangan daerah perlu ditangani dengan sebaikbaiknya. Pengeluaran dan pemasukan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemasukan daerah diupayakan untuk selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus seefisien mungkin. Untuk diperlukan pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dialokasikan seefisien mungkin.

Menurut Davey dalam (Widhi, 2011), tujuan hubungan antara pusat dan daerah adalah :

1. adanya pembagian wewenang yang rasional antar tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya ;

2. pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan) ;
3. pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah lainnya ; dan
4. pemerintah daerah dalam mengupayakan pendapatan sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut.

- 1) Pendekatan Kapitalisasi

Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibidang keuangan adalah atas dasar kuasi komersial. Disini pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah, berpatungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola namun keuntungan yang diperoleh sebagian menjadi hak pusat dan sebagian menjadi hak daerah sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya.

- 2) Pendekatan Sumber Pendapatan

Pendekatan ini didasarkan pada sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau kewenangan untuk menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.

### 3) Pendekatan Belanja

Pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan pengeluaran biaya-biaya untuk proyek atau untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah. Ada beberapa persyaratan dalam pendekatan ini, yaitu subsidi pemerintah pusat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dan alokasi bantuan pada masing-masing daerah dan kebutuhan biaya-biaya pembangunan tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.

### 4) Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan di subsidi pusat.

#### **2.1.8 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan

keuangannya. Di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari (Haryanto, 2008) :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

Sesuai bunyi pasal 5 UU No 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya Pendapatan Daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sementara itu pasal 10 UU No 33 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan SDA. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No 33 Tahun 2004 dibagi di antara daerah provinsi, kabupaten/kota dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi
2. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan
3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan

Sementara itu 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbang sebagai berikut ;

1. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan
2. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi dan

2. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota

Sementara itu 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota (Haryanto, 2008)

### **2.1.9 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Rudy Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Smith dalam (Rudy Badrudin, 2012), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi :

- 1) Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- 2) Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai – nilai kemanusiaan.
- 3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Menurut Sudarsono, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktivitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut.

Pada tahun 1990, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan formula Human Development Index (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara/daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak.

#### **2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Menurut Human Development Report (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah

kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;

- Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

- Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

- Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.

- Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

- 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir

- 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dan angka melek huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih)
- 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP-Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah).

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\mathbf{IPM = (X1+X2+X3)/3} \quad (2.8)$$

dimana:

**X1** = angka harapan hidup

**X2** = tingkat pendidikan

**X3** = tingkat kehidupan yang layak

Secara detail, prosedur penghitungan IPM dapat dilihat dalam publikasi Indonesia Laporan Pembangunan Manusia BPS, Bappenas, dan UNDP (2001).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini mengenai kemandirian fiskal dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis. Adanya perbedaan dalam penelitian ini yang terdiri dari lokasi, waktu, dan tingkat IPM daerah. Penelitian terdahulu, antara lain :

1. Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (2009)

Dengan judul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia”

Dengan kesimpulan :

Hasilnya menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan belanja modal juga berpengaruh terhadap IPM.

2. Kusreni dan Suhab (2009)

Dengan judul “Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan”.

Dengan kesimpulan :

Diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan penelitian antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan.

3. Septian Bagus Pambudi (2008)

Dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”

Dengan kesimpulan :

bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian komponen IPM, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Purchasing Power Parity (PPP) kabupaten/kota di Jawa Barat untuk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten.

4. Pujiati (2008)

Dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah karesidenan semarang”

Dengan kesimpulan :

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Decta Pitron Lugastoro (2013)

Dengan judul “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur”

Dengan kesimpulan :

- a. Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- b. Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin besar kemampuan DAU dalam membiaya belanja modal akan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.
- c. Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan.
- d. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa

Timur. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

- e. Variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.

6. Arbie Gugus Wandira (2013)

Dengan Judul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”

Dengan Kesimpulan :

- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal.
- Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal.
- Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal.
- Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal.

7. A. Paramita (2012)

Dengan Judul “Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar Periode tahun 2000-2009”

Dengan Kesimpulan :

- Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang pendidikan mempunyai pengaruh (positif) dan (signifikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar.
- Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang kesehatan serta Variabel Dana Alokasi Khusus untuk sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar.
- Variabel Dana Alokasi Khusus untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap IPM.

**Tabel 2.1**  
**Research Gap**

No	Peneliti	Permasalahan Penelitian	<i>Research Gap</i>	Metode Analisis
1	Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi (2009)	Melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAU yang diterima untuk kepentingan belanja modal dan bagaimana dampak alokasi belanja ini terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAU berpengaruh terhadap belanja modal,</li> <li>• dan belanja modal juga berpengaruh terhadap IPM.</li> </ul>	teknik analisis statistik inferensia dengan menggunakan regresi sederhana ( <i>simple regression</i> )
2	Kusreni dan Suhab (2009)	pengaruh kapasitas fiskal, alokasi belanja modal dan pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.	Diperoleh beberapa hasil yang berkaitan dengan penelitian antara lain (i) kapasitas fiskal (PAD dan DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan (IPM), (ii) kapasitas fiskal berpengaruh lebih besar daripada alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan	Metode data panel analisis regresi linear berganda dengan pendekatan <i>random effect</i>
3	Septian Bagus Pambudi (2008)	Daerah sulit untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal karena masih membutuhkan bantuan dari pusat yang cukup besar. Keberagaman kemampuan pembiayaan pembangunan	Kesimpulan penelitian ini bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian komponen IPM, antara lain Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Purchasing Power Parity (PPP) kabupaten/kota di Jawa Barat untuk daerah perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten.	Metode data panel dengan <i>Random Effect Model</i>

		menyebabkan tingkat kemandirian fiskal antar daerah yang juga beragam, hal ini akan menyebabkan keberagaman dan ketimpangan pula dalam menghasilkan <i>performance</i> pembangunan manusia sebagai sasaran akhir pembangunan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.		
4	Pujiati (2008)	Melihat pengaruh PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah karesidenan semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Metode data panel dengan <i>Fixed Effect Model</i>
5	Decta Pitron Lugastoro (2013)	beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka peningkatan IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari lima variabel independen, variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti melalui implikasi kebijakan	f. Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. g. Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin besar kemampuan DAU dalam membiaya belanja modal akan dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.	Metode data panel dengan <i>Random Effect Model</i>

		pemerintah daerah dengan pertimbangan	<p>h. Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan DBH dalam membiayai belanja modal akan meningkatkan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan.</p> <p>i. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel PE mempunyai pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.</li> </ul>	
6	Arbie Gugus Wandira (2013)	Belum maksimalnya peran pemerintah dalam melakukan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal.</li> <li>• Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal.</li> <li>• Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal.</li> <li>• Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal.</li> </ul>	Metode analisis deskriptif
7	A. Paramita (2012)	Apakah realisasi APBD (Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan) serta DAK khususnya untuk sektor pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan bidang pendidikan mempunyai pengaruh (positif) dan (signifikan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar.</li> <li>• Variabel Belanja Modal dan Biaya Operasional Pemeliharaan</li> </ul>	Metode analisis regresi berganda

		dan sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar periode tahun 2000-2009	bidang kesehatan serta Variabel Dana Alokasi Khusus untuk sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar. • Variabel Dana Alokasi Khusus untuk sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan terhadap IPM di Kota Makassar	
--	--	---	--	--

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam diberlakukannya desentralisasi fiskal yang sangat berhubungan dengan peran pemerintah dalam hal ini adalah pelaksana pembangunan memerlukan banyak sekali bantuan selain pendapatan asli daerah (PAD), dimana salah satunya adalah berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) guna pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui belanja modal (BM). Sekaligus juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan mengurangi beban dari pemerintah pusat.

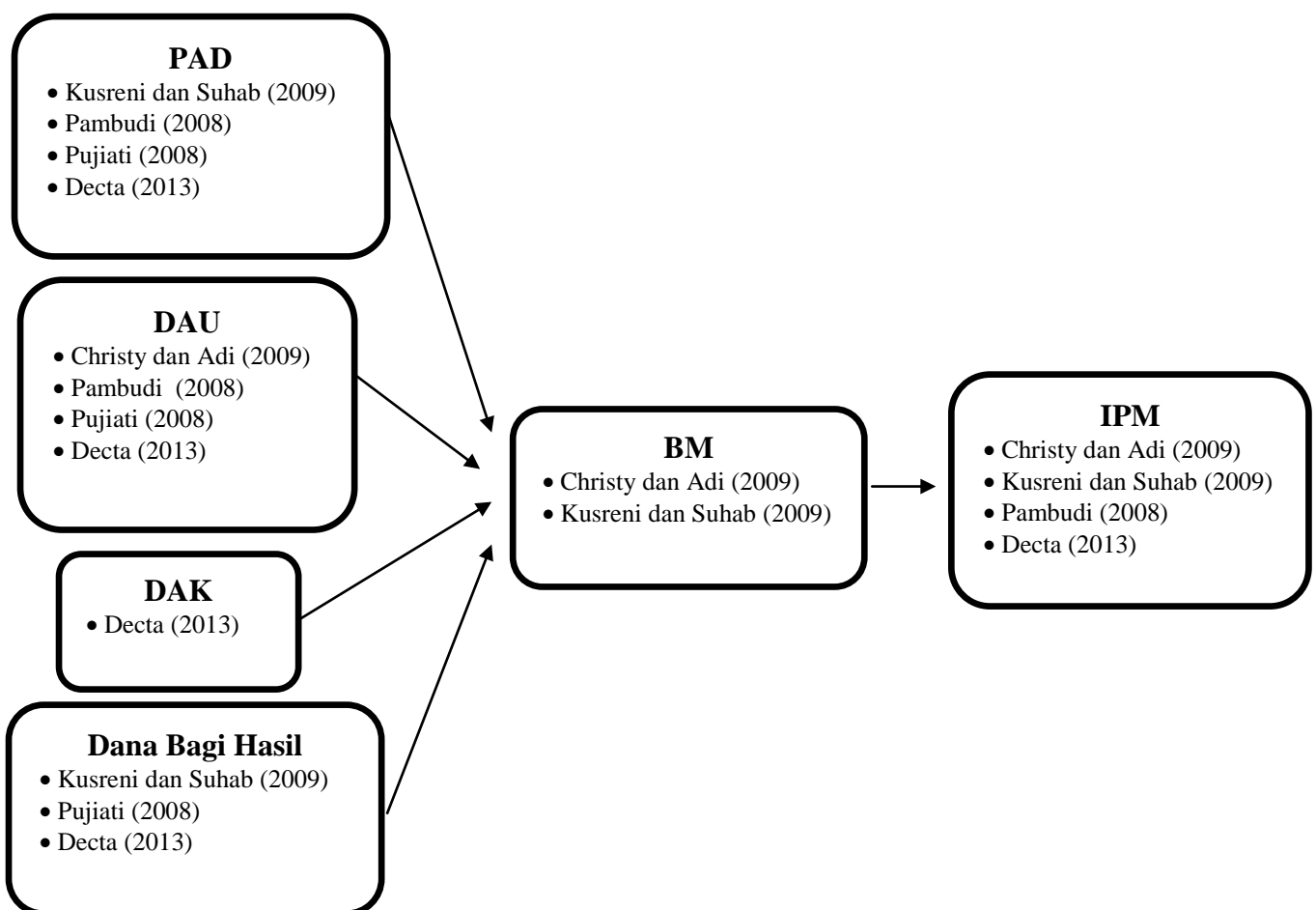
Menurut para ahli mengenai Indeks Pembangunan Manusia dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan ekonomi dengan salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Sebuah daerah dikatakan berkembang, maju, terbelakang dapat dilihat dari IPM.

Jika suatu daerah semakin mandiri maka dengan pendapatan asli daerah akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, sehingga dana alokasi umum kepada daerah tersebut akan semakin kecil. Tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang melalui pembangunan manusia yang

dapat diukur atau dinilai dari Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia.

Apabila digambarkan kerangka pemikiran akan seperti berikut :

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

Sesuai dengan tujuan, kerangka pemikiran, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
2. Diduga dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
3. Diduga dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
4. Diduga dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.
5. Diduga belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Varibel dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal (BM) sekaligus data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2004 – 2011.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang mewakili bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pembangunan untuk hidup layak yang dinyatakan dalam angka.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah pemerintah di kabupateen/kota eks karesidenan surakarta pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam rupiah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah penerimaan daerah yang berasal dari pusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah dan dinyatakan dalam rupiah.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah penerimaan daerah yang berasal dari pusat guna membiayai kegiatan – kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan dinyatakan dalam rupiah.
5. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah yang dinyatakan dalam rupiah.
6. Belanja Modal (BM) adalah yang berasal dari pengeluaran pemerintah masing – masing kabupaten/kota eks karesidenan surakarta yang dinyatakan dalam rupiah.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data jenis sekunder dengan periode 2004 – 2011. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Internet, Jurnal dan Penelitian Terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.3 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalam beberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data *cross*

*section* atau data *time series* secara terpisah. Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan metode panel yaitu (Gujarati, 2003):

1. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari heterogenitas. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
2. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
3. Penggunaan data panel mampu meminimasi bias yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu:

- 1) *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Common*
- 2) *Fixed Effect Model* (FEM)
- 3) *Random Effect Model* (REM) , (Baltagi, 2005).

### **3.3.1 *Pooled Least Square* (PLS) atau metode Common**

Model pertama menggunakan data yang digabung kemudian diestimasi adalah merupakan penggunaan metode *Pooled Least Squares* (PLS) atau metode Common. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen. Terhadap variable dependen konstan untuk setiap *cross section* dan *time series*. Artinya metode ini tidak memperhitungkan ‘*nature*’ dari perubahan yang terjadi di setiap *cross section* dan *time series* sehingga kompleksitas kenyataan sebenarnya tidak dapat dicerminkan dalam metode ini. Persamaan model PLS sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta X_{it}^j + u_{it} \quad (3.1)$$

$$i = 1, \dots, N \quad \text{dan } t = 1, \dots, K$$

Di mana N adalah jumlah unit *cross section* (individu) dan T adalah jumlah *time series* (periode waktu). Proses estimasi menggunakan metode PLS dilakukan dengan menggabungkan unit time series dan unit cross section sehingga menghasilkan jumlah observasi sebanyak NT. Asumsi dasar pada pendekatan PLS adalah nilai intersep ( $a$ ) dan nilai slope ( $\beta$ ) antar unit cross section dan unit time series adalah konstan/sama.

### 3.3.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode ini memiliki beberapa kemungkinan asumsi yang bisa digunakan peneliti berdasarkan kepercayaannya dalam memilih data, seperti:

- a) Intersep dan koefisien slope konstan dari setiap cross section di sepanjang waktu. Error term diasumsikan mampu mengatasi perubahan sepanjang waktu dan individu. Asumsi ini mengikuti asumsi dalam metode OLS.
- b) Koefisien slope konstan namun intersepnya bervariasi di setiap cross section.
- c) Seluruh koefisien baik slope maupun intersep bervariasi setiap individu.

Pendekatan ini memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai intersep antar unit cross section. Pendekatan dengan memasukan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*). Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a_i + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^N a_i D_i + u_{it}$$

$$i = 1, \dots, N \quad \text{dan } t = 1, \dots, K \quad (3.2)$$

keterangan :

$Y_{it}$  = variabel terikat di waktu t untuk unit cross section i

$a_i$  = intersep yang berubah – ubah antar unit cross section

$X_{it}^j$  = variabel bebas ke-j di waktu t untuk unit cross section i

$\beta_j$  = parameter untuk variabel bebas ke-j

$u_{it}$  = komponen error di waktu t untuk unit cross section i

Keputusan memasukan variabel boneka ( $D_i$ ) pada pendekatan fixed effect tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

### 3.3.3 *Random Effect Model*

Kelemahan dari pendekatan LSDV adalah penambahan variabel boneka ternyata dapat mengurangi derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Kelemahan ini kemudian diatasi dengan pendekatan ketiga yaitu pendekatan efek acak (random effect). Asumsi dasar pada pendekatan efek acak adalah perbedaan nilai intersep antar unit cross section dimasukan ke dalam error. Karena hal ini pendekatan efek acak sering disebut model variance components. Persamaan model variance components sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta X_{it}^j + u_{it} \rightarrow u_{it} = u_i + v_t + w_{it} \quad , \quad i = 1, \dots, N \text{ dan } t = 1, \dots, K \quad (3.3)$$

Keterangan :

$u_i \sim N(0, \delta u^2)$  = komponen cross section error

$v_t \sim N(0, \delta v^2)$  = komponen time series error

$w_{it} \sim N(0, \delta w^2)$  = komponen error kombinasi

Pendekatan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada pendekatan efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.

### 3.3.4 Pemilihan Model

Sebelum dilakukan pembahasan hasil model regresi panel data, akan dilakukan pemilihan model terbaik yang akan digunakan sebagai dasar melakukan analisis. Dalam pemilihan model dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) LM\_test adalah pengujian untuk memilih PLS atau Random effect
- 2) Uji Hausman digunakan untuk memilih fixed effect atau random effect (Baltagi, 2005).

#### 3.3.4.1 Uji LM\_Test

LM\_Test adalah pengujian untuk memilih model PLS atau model random effect. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

H0: Model PLS (Restricted)

H1: Model Random effect (Unrestricted)

Formulasi untuk menguji hipotesa diatas dengan menggunakan tabel distribusi chi\_squares seperti yang dirumuskan oleh Breusch\_Pagan :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \quad (3.5)$$

Keterangan :

$\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e_{it}^2$  = restricted residual sum square (merupakan sum of square residual dari estimasi panel dengan metodel PLS/common intercept)

$\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2$  = jumlah error kuadrat dari pendekatan PLS

N = jumlah data cross section

T = jumlah data time series

Jika nilai LM\_Test (  $\chi^2$  Stat) hasil pengujian lebih besar dari  $\chi^2$  Tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah model random effect dan sebaliknya.

#### 3.3.4.2 Uji Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect. Hipotesa pengujian ini sebagai berikut :

H0: random effect model

H1: fixed effect model

Perhitungan hausman test menggunakan program evIEWS. Jika nilai hausman test hasil pengujian lebih besar dari  $\chi^2$  Tabel, maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah fixed effect model dan sebaliknya.

#### 3.3.5 Model Analisis

Model ekonomi yang digunakan untuk mengestimasi fungsi derajat kemandirian fiskal dinyatakan sebagai berikut :

$$BM = f(\text{Desentralisasi Fiskal}) \quad (3.6)$$

$$IPM = f(\text{Belanja Modal}) \quad (3.7)$$

Selanjutnya fungsi 3.6 dan 3.7 diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut :

$$BM = a_0 + a_1PAD_{it} + a_2DAU_{it} + a_3DAK_{it} + a_4DBH_{it} + E_{it} \quad (3.8)$$

$$IPM = \beta_0 + \beta_1BM_{it} + E_{it} \quad (3.9)$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan manusia

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

BM = Belanja Modal

i = cross section

t = time series

$a_0$  = intercept model BM

$\beta_0$  = intercept model IPM

$a_1, \dots, a_4$  = koefisien regresi model BM

$\beta_1$  = koefisien regresi model IPM

$E_{it}$  = komponen eror di waktu (t) untuk unit cross section (i)

### 3.3.6 Deteksi Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model secara teoritis, maka model regresi harus memenuhi asumsi – asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat konsisten dan efisien secara teori. Menurut Gujarati (2003) ada 11 asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan OLS atau yang dikenal dengan asumsi klasik :

1. Model regresi linear, artinya linear dalam parameternya.
2. Nilai regresor  $x$  diasumsikan non-stokastik, artinya nilai  $x$  dianggap tetap dalam sampel yang berulang.
3. Nilai rata – rata gangguan  $\mu_i$  adalah nol.
4. Homoskedastisitas, artinya varians gangguan  $\mu_i$  sama untuk setiap periode (Homo = sama, skedastisitas = sebaran)
5. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  tidak ada korelasi).
6. Antara  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  saling bebas.
7. Jumlah observasi,  $n$  harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel independen).
8. Adanya variabilitas dalam  $x_i$ , artinya nilai  $x_i$  harus beda.
9. Model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris
10. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antara variabel  $x$ .
11. Nilai kesalahan  $\mu_i$  terdistribusi secara normal.

Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga langkah – langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja yang sama dengan uji regresi. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut yaitu deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi.

### **3.3.6.1 Deteksi Multikolinearitas**

Deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen variable). Deteksi multikolinearitas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas. Bila terjadi hubungan linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Masalah multikolinearitas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas, dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

1. Bila nilai  $R^2$  yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen.
2. Melakukan regresi parsial dengan cara membandingkan nilai  $R^2$  dalam model persamaan awal dengan  $R^2$  pada model persamaan

regresi parsial, jika nilai dalam regresi parsial lebih tinggi maka didalamnya terdapat multikolinearitas.

3. Melakukan korelasi antar variabel – variabel independen. Bila nilai korelasi independen lebih dari 0,8 maka terdapat multikolinearitas.

### 3.3.6.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji white. Uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat dengan variabel bebas. Dapatkan nilai  $R^2$ , untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Kriteria yang digunakan adalah apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs\*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

### 3.3.6.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa – masa sebelumnya.

Salah satu cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin – Watson (DW). Uji D-W ini merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, nilai d akan berada pada kisaran 0 hingga 4 (Wing Wahyu, 2009).

**Tabel 3.1**  
**Durbin-Watson**

Tolak H0, berarti ada auto korelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak menolak H0, berarti tidak ada autokorelasi	Tidak dapat diputuskan	Tolak H0, berarti ada autokorelasi negatif
0	dL	du	2	4
	1,10	1,54	2,46	4-dL
			4-du	4
			2,90	

Sumber : Wing Wahyu (2009)

### 3.3.7 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan menguji apakah nilai error (Eit) dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan Jarque – Bera test (J-B test) untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis :

H0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam uji ini dilihat probabilitas dari J-B test, dimana apabila probabilitas lebih besar dari 5% (dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%), maka data berdistribusi normal atau dengan kata lain H0 diterima (Wing Wahyu, 2009).

### 3.3.8 Pengujian Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya ( $R^2$ ), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

#### 3.3.8.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai  $R^2$  berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Semakin besar  $R^2$ , semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen (Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

1. Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil  $R^2$ , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
2. Untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel  $x$  terhadap variabel  $y$  untuk mengukur proporsi/persentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel  $x$  terhadap variabel  $y$ .

### 3.3.8.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0 \quad (\text{tidak ada pengaruh})$$

$$H_1 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0 \quad (\text{ada pengaruh}) \quad (3.10)$$

Dengan demikian keputusan yang diambil adalah :

- Terima  $H_0$  jika  $F$  statistik  $<$  nilai  $F$  tabel, artinya suatu variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

- Terima  $H_1$  jika nilai F statistik > nilai F tabel, artinya nilai suatu variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

### 3.3.8.3 Uji T

Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel bebas yang lain konstan. Hipotesis nol yang digunakan adalah :

$$H_0 : \beta_0 = 0 \quad (3.11)$$

Artinya apakah variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya adalah :

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \quad (3.12)$$

Artinya apakah variabel independen merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan nilai t hitung, jika nilai t hitung > t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel maka  $H_1$  ditolak, yang berarti variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.